

BAB II

DILEMATIS KOREA SELATAN TERKAIT ALIANSI DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK

Menjalin hubungan baik dan kerjasama antar negara menjadi suatu strategi yang dipilih negara demi melangsungkan kepentingan nasionalnya. Dalam kajian ilmu Hubungan Internasional, hubungan ini dikenal dengan istilah aliansi. Aliansi merupakan bentuk hubungan yang dijalin diantara negara yang mencakup kerjasama dalam lingkup internasional yang berlangsung selama periode waktu yang disepakati bersama. Adapun kerjasama diusung dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan militer. Bab ini akan dibagi ke dalam tiga subbab yang berisikan tentang penjabaran lebih dalam tentang bagaimana hubungan dan bentuk kerjasama yang dijalin Korea Selatan dengan kedua negara adidaya yakni, Amerika Serikat dan Tiongkok, bab ini juga membahas kemunculan dan berbagai dampak dari keberadaan industri kebudayaan di Korea Selatan.

Bagian pertama dalam bab ini akan membahas histori hubungan yang dibangun Amerika Serikat dan Korea Selatan sejak awal bantuan Amerika Serikat pada perang Korea hingga bentuk kerjasama yang dilangsungkan pasca Perang. Selanjutnya bagian kedua akan membahas histori hubungan Tiongkok dan Korea Selatan dan bentuk kerjasama yang dijalin oleh kedua negara khususnya dalam persebaran industri budaya milik Korea Selatan. Terakhir, bagian tiga dalam bab ini akan membahas mengenai kemunculan *Korean Wave* dan sanksi boikot Tiongkok terhadap industri kebudayaan Korea Selatan.

2.1 Aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat

Sejarah mencatat, Amerika Serikat dan Korea Selatan mulai menjalin hubungan sejak masa perang Korea. Dalam perang Korea, Korea Selatan mengalami kelumpuhan pertahanan dan militer pasalnya Korea Utara bertindak sangat agresif dan menginvasi Korea Selatan. Amerika Serikat menjadi negara yang menawarkan bantuan kepada Korea Selatan, adapun bantuan berupa pengiriman pasukan militer ke Semenanjung Korea guna melindungi Korea Selatan pada Perang Korea (Djelantik, 2015). Tidak berhenti hanya pada bantuan saat perang, pasca perang keduanya melangsungkan hubungan yang semakin memperjelas Amerika Serikat menjadi aliansi militer bagi Korea Selatan dimana pada tahun 1954 keduanya menyepakati perjanjian bersama yaitu *Mutual Defense Treaty* (MDT). MDT menjadi perjanjian yang menetapkan Amerika Serikat sebagai aliansi militer sekaligus sebagai mitra operasi komando pasukan gabungan Korea Selatan dan dalam hal ini, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk merencanakan pembelaan bagi Korea Selatan (CRS Report for Congress, 2010). Dalam MDT ditetapkan bahwa Amerika Serikat dan Korea Selatan bersepakat untuk meningkatkan pertahanan militer Korea Selatan di Semenanjung Korea lewat berbagai latihan militer dan pengadaan alutsista militer, pengembanganalih teknologi militer, dan penempatan pasukan bersama di Semenanjung Korea (Gusfianda, 2017).

Keagresifan Korea Utara semakin ditunjukkan dengan kepemilikan dan pengembangan nuklir dalam negranya. Hal ini tentu mebawa keresahan sekaligus ancaman bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, terlebih negara tetangganya

Korea Selatan. Dalam kajian ilmu hubungan Internasional dikenal istilah *security dilemma*, istilah ini mengarah pada adanya geloak atau ketakutan yang dimiliki negara sebagai akibat dari semakin memadainya pertahanan militer dari negara lain yang disinyalasi sebagai ancaman bahkan ajakan untuk berperang secara militer. Hal ini yang kemudian terjadi di kawasan Asia Pasifik pasca kepemilikan nuklir oleh Korea Utara. Untuk itu, Amerika Serikat merasa perlu terlibat sebagaimana Amerika Serikat memosisikan diri sebagai negara penyeimbang keamanan regional dan penentang keberadaan nuklir. Terlebih, tanggung jawab sebagai aliansi militer dan mitra penjaga Korea Selatan, semakin membenarkan sikap Amerika Serikat untuk terlibat dalam *security dilemma* di kawasan (Syahrin, 2019). Sebagai upaya untuk dapat membendung keagresifan Korea Utara dan menjaga kestabilan keamanan kawasan, Amerika menginisiasi perjanjian internasional yang melarang kepemilikan nuklir yaitu *Non-Proliferation Treaty* (NPT) (Charles J. Moxley Jr, 2011). Namun perjanjian ini gagal membatasi aktivitas nuklir Korea Utara. CTBTO *Preparatory Commission* mencatat aktivitas uji coba senjata nuklir Korea Selatan sebagai berikut:

Tabel 1.

Hasil Uji Coba Nuklir Korea Utara

Tanggal Hasil Uji (kiloton)

9 – 10 – 2006	0.5 – 1
25 – 05 – 2009	2 – 3
12 – 02 – 2013	6 – 7
6 – 01 – 2016	6 – 7
9 – 09 – 2016	11 – 12

Sumber: (CTBTO Preparatory Commission, 2017)

Berdasarkan data diatas dapat dipahami bawhasanya perjanjian NPT tidak cukup untuk membendung kepemilikan nuklir Korea Utara sebagaimana data membuktikan Korea Utara semakin gencar dalam kepemilikan dan aktifitas uji coba nuklir. Tabel diatas menggambarkan adanya uji ciba nuklir yang semakin intens dilakukan Korea Utara tentu semakin mengancam keamanan semenanjung Korea secara khusus dan seakan memberi teror kepada tetangganya, Korea Selatan. Amerika Serikat sebagai aliansi militer tentu tidak daoat tinggal diam melihat perlakuan Korea Selatan, , untuk itu keduanya semakin serius dan memperkuat aliansi militer. Hingga pada Februari 2016, dimasa kepemimpinan Barack Obama, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan diskusi untuk menginisiasi sebuah

teknologi militer dan sistem pertahanan demi dapat menjaga kestabilan semenanjung Korea (Mary Beth Nikitin, 2010).

Pemerintah Amerika Serikat menawarkan sebuah sistem pertahanan yang berteknologi canggih diproduksi oleh Lockheed Martin. Perusahaan Amerika Serikat yang bergerak dibidang keamanan yang memiliki peranan dalam penulisan, perancangan, pengembangan, pembuatan, integrasi, dan pemeliharaan sistem teknologi, produk, dan layanan berteknologi tinggi ini dimintakan untuk memproduksi sistem yang paling efektif digunakan untuk dilema yang ada di Korea Selatan. (Lockheed Martin, 2010). Adapun sistem pertahanan yang berhasil dicetuskan Lockheed Martin adalah *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD). THAAD adalah sistem pertahanan yang dirancang untuk dapat menangkal rudal balistik, mendeteksi dan menangkam ancaman yang masuk melalui udara, sekaligus sistem yang dapat memburu dan meledakkan rudal dilangit. Sehingga apabila Korea Utara sewaktu-waktu melepaskan nuklir ke Korea Selatan, sistem ini dapat mendeteksi dan menangkalnya (Chu, 2006).

Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan kemudian menawarkan sistem pertahanan THAAD untuk dipasang di Korea Selatan, dalam penawaran yang berlangsung pada 8 Juli 2016 (BBC News, 2016). Dalam proses penawaran dan perundingan, ketentuan terkait operasional THAAD juga dibahas sebagaimana sesuai ketentuan dalam *Status of Forces Agreement* (SOFA), Korea Selatan akan menjadi pihak yang menanggungjawab wilayah pemasangan berupa tanah dan fasilitas lain yang dibutuhkan dalam pemasangan THAAD. Disisi lain, pihak Amerika Serikat bertanggung jawab atas penyediaan dana untuk pengoperasian

sistem THAAD (Mason, 2012) Setelah saling bersepakat, penempatan THAAD kemudian dilakukan pada tanggal 30 September 2017 di Seongju, Provinsi Gyeongsang Utara Korea Selatan atau sering disebut dengan Semenanjung Berikut peta penempatan THAAD yang kontroversial dan dinilai mengancam stabilitas kawasan (Chris Inton, 2017):

Gambar 1.

Peta Penempatan THAAD



Sumber: (Missile Defense Agency; Raytheon; Lockheed Martin; Missile Defense Advocacy Alliance; Union of Concerned Scientists; Reuters,2017)

Melalui gambar diatas dapat dilihat titik pemasangan THAAD yang dianggap menyalahi oleh berbagai pihak dengan itu putusan Korea Selatan bersama aliansi militernya, Amerika Serikat terkait pemasangan THAAD tercatat telah menuai banyak penolakan dan kontriversi. Banyak pihak yang meragukan pemasangan THAAD dengan pertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan

pemasangan itu, seperti bahaya terhadap lingkungan serta adanya kekhawatiran akan keberadaan THAAD yang semakin memicu keagresifan Korea Utara. (Tayler, 2016). Lebih lagi, keberadaan THAAD juga menjadi turut mempengaruhi hubungan antara Korea Selatan dan mitra dagang terbesarnya yaitu Tiongkok. Sejarah mencatat, hubungan kedua negara erat dalam sektor pertahanan sebagaimana sedari awal Amerika Serikat menjadi mitra keamanan bagi Korea Selatan dan secara intens mengembangkan kerjasama pertahanan diantara keduanya, sementara dalam sektor lain hubungan kedua negara cenderung stagnan. Disisi lain, hubungan aliansi kedua negara dinilai dapat semakin meningkatkan security dilemma di kawasan Asia Timur karena adanya pengemangan teknologi militer (Panda, 2017).

2.2 Aliansi Korea Selatan dan Tiongkok

Sejak tahun 1992, Korea Selatan dan Tiongkok telah memulai hubungan bilateral namun hubungan diantara keduanya tergolong stagnan dan tidak secara intens, pasalnya kedua negara memiliki kepentingan nasional dan isu strategis yang berbeda. Korea Selatan fokus pada pertahanan dan militer sebagaimana sejak perang Korea, negara ini hampir mengalami kegagalan, lebih lagi kedekatannya dengan Amerika Serikat semakin membuat Korea Selatan fokus pada pertahanan negara. Disisi lain, Tiongkok fokus pada upaya mengembangkan perekonomian dan mengembalikan masa kejayaan negara (Lisbet, 2018). Keberhasilan Tiongkok mengembalikan masa kejayaan dan menjadi negara paling dominan di kawasan kemudian menjadi awal yang merubah hubungan Tiongkok dan Korea Selatan.

Pasca menjadi kekuatan baru, Tiongkok tidak hanya berfokus pada perekonomian negara, namun kemudian mulai mengembangkan kapabilitas pertahanan dan militer.

Tidak berhenti disitu, Tiongkok merubah arah kebijakan luar negeri yang mana sebelumnya cenderung pasif dan fokus pada pengembangan dalam negeri, kemudian menjadi aktif dalam kanca internasional dan meningkatkan partisipatif dan proaktif terhadap berbagai isu dan fenomena yang ada di kanca internasional (Wayne, 2018). Secara khusus di kawasan Asia Timur, Tiongkok yang mengusung slogan *Chinese Dream*, menjadikan negara semakin fokus untuk menjadi negara paling berpengaruh di kawasan (Xuetong, 2006). Dalam hal ini aliansi sekaligus kedekatan yang tengah dibangun Korea Selatan dan Amerika Serikat menjadi hambatan bagi Tiongkok mewujudkan visinya. Lebih lagi, Tiongkok telah membidik Korea Selatan sebagai salah satu aliansinya dikawasan untuk semakin menjadikan Tiongkok sebagai negara adidaya di kawasan secara khusus (Sorensen, 2015).

Adapun alasan Tiongkok untuk menargetkan Korea Selatan sebagai mitra bagi karena Tiongkok berupaya menekan dan membendung pengaruh Amerika Serikat di Korea Selatan sehingga dominasi Tiongkok terwujud. Maka dengan ini Tiongkok berupaya untuk menekan pengaruh Amerika Serikat dengan mempererat hubungan bilateral dengan berbagai negara-negara di Asia agar mulai memihak Tiongkok (Johnson, 2017). Selain itu, posisi Korea Selatan menjadi penting bagi Tiongkok karena adanya kemunduran dalam hubungan yang dibangun anatar Tiongkok dan Korea Utara, sehingga untuk dapat berpengaruh dan menyebarkan

dominasi di kawasan Tiongkok memerlukan negara sebagai mitranya yaitu Korea Selatan (Kim, 2014). Tiongkok berupaya menjadlin hubungan dengan Korea Selatan melalui berbagai aspek, mulai dari budaya, pertukaran pelajar, pariwisata, hingga perdagangan. Korea Selatan tentu sangat terbuka untuk hal tersebut sebagaimana hubungannya dengan Tiongkok dapat meningkatkan devisa negara.

Sejak tahun 2013, Korea Selatan fokus dalam memproduksi dan mengeksport berbagai produk kebudayaan dan menjadikan industri kebudayaan sebagai salah satu pendapatan utama negara. Dimulai dari kosmetik atau K-beauty, drama atau K-drama, hingga musik atau K-pop, berbagai produk tersebut diproduksi Korea Selatan dan menyebarkannya secara mendunia. Hubungan Korea Selatan dan Tiongkok yang fokus pada ekonomi dan perdagangan meluas pada tingginya impor Tiongkok atas produk-produk kebudayaan milik Korea Selatan. Tidak hanya itu, tingginya minat massa Tiongkok terhadap kebudayaan Korea Selatan serta merta menarik para wisatawan Tiongkok ke Korea Selatan sehingga meningkatkan pendapatan Korea Selatan dalam sektor pariwisata. Hingga tahun 2016, Tiongkok tercatat sebagai pangsa pasar utama Korea Selatan melalui tingginya impor kosmetik dan berbagai produk kebudayaan hingga banyaknya turis dari Tiongkok yang mengunjungi Korea Selatan (Liu, 2007).

Akan tetapi dipenghujung tahun 2016, hubungan perdagangan dan ekspor-impor yang intens ini dihadapkan pada permasalahan karena isu keamanan yang tengah dihadapi Korea Selatan. Pasalnya, Korea Utara semakin agresif dalam kepemilikan dan pengembangan nuklir bahwa intens melangsungkan uji coba nuklir di semenanjung Korea. Keadaan ini semakin meningkatkan security

dilemma bagi kawasa Asia Timur terlebih bagi Korea Selatan sebagai negara yang berbatasan langsung dengan korea Utara (BBC News, 2016). Dalam situasi ini, Amerika Serikat sebagai aliansi militer bagi Korea Selatan kemudian menunjukkan keterlibatan dengan menawarkan pemasangan sistem pertahanan berupa misil balistik yakni THAAD yang dipercaya dapat menangkal dan mendeteksi apabila terdapat nuklir yang diarahkan ke Korea Selatan. Dalam keadaan terancam, secara otomatis, Korea Selatan setuju dan melangsungkan pemasangan THAAD di beberapa titik (Lisbet, 2018).

Namun bagi Tiongkok pemasangan THAAD merupakan putusan yang tidak tepat dan dinilai merusak hubungan baik diantara Korea Selatan dan Tiongkok. Berbagai alasan dikemukakan Tiongkok untuk menentang dan menolak pemasangan THAAD, mulai dari kekhawatiran akan semakin memicu konflik pertahanan di kawasan hingga menilai pemasangan THAAD dinilai tidak efektif di Korea Selatan (Meick, 2017). Akan tetapi alasan utama adalah karena pemasangan THAAD dinilai sebagai inisiasi Amerika Serikat semata-mata untuk dapat melakukan spionase terhadap Tiongkok karena letak THAAD yang berada disekitar semenanjung Korea dan dapat menjangkau Tiongkok, lebih lagi pemasangan ini akan melumpuhkan upaya Tiongkok dalam menggeser dominasi Amerika Serikat di kawasan (Tayler, 2016)

Hua Chunying, salah satu juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan adanya kekecewaan Tiongkok pada pilihan Korea Selatan yang dinilai tidak mempertimbangkan keamanan Tiongkok. Lebih lagi putusan ini dinilai akan berdampak negatif dan berpotensi merusak hubungan bilateral antar

kedua negara (Swaine, 2017). Pemerintah Korea Selatan berupaya membuat penjelasan kepada Tiongkok terkait tujuan pemasangan THAAD namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Tiongkok. Hubungan diantara kedua negara semakin memburuk hingga Tiongkok semakin serius dan tegas dalam menunjukkan penolakannya terhadap keputusan pemasangan THAAD. Tiongkok kemudian berusaha menekan dan menghukum Korea Selatan lewat menyerang secara langsung ekonomi Korea Selatan dengan sanksi boikot. Tiongkok melumpuhkan Korea Selatan dengan sanksi ini sebagaimana Korea Selatan tengah fokus pada produksi dan penyebaran produk-produk industri kebudayaan yang menjadi sumber pendapatan utama (Kwon, 2017).

Secara spesifik, berikut bentuk-bentuk sanksi boikot yang dikenakan Tiongkok terhadap Korea Selatan. Pertama, adanya pelarangan penayangan drama yang diproduksi Korea Selatan dari TV Nasional Tiongkok dan secara otomatis mengubah tayangan TV dengan drama serial milik Tiongkok, beberapa drama Korea yang diblokir Tiongkok yakni “Uncontrollably Fond”, “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo”, “Pinocchio” dan “Where is Love?”. Kedua, selain drama Korea, terdapat 16 acara atau program televisi Korea Selatan yang dilarang tayang di TV Nasional Tiongkok seperti serial SBS “Saimdang” dan “Light's Diary”. Ketiga, adanya pemecatan dan pembatalan kerjasama pekerja industri budaya dari proyek Tiongkok, terdapat beberapa bintang iklan yang digantikan oleh Tiongkok. Pemecatan dialami oleh bintang Hallyu Jun Ji Hyun dan Song Joong Ki, brand ambassador dari salah satu merk ponsel di Tiongkok.

Keduanya mendapat pemutusan kontrak dan perannya digantikan oleh aktor dan aktris asal Tiongkok (The Korea Times, 2016).

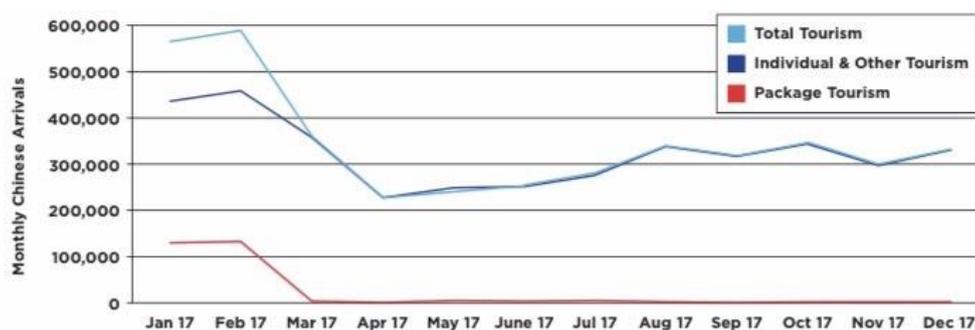
Keempat, pelarangan juga dihadapi K-pop atau industri musik Korea Selatan, tercatat beberapa konser dan pertunjukan musik yang dibatalkan dan tidak diberi izin oleh Tiongkok, seperti pembatalan penampilan bintang K-pop Psy dan iKON dalam acara *Heroes of the Remix* (Chitrakorn, 2016). Selain itu, grup penyanyi EXO juga mengalami pembatalan acara karena proses perizinan tidak mendapat persetujuan dari pemerintah Tiongkok. Dua konser EXO selama Agustus 2016 di Shanghai dibatalkan oleh Tiongkok (Sang-Hun, 2016). Kemudian konser EXO di Nanjing, yang seharusnya digelar pada 17 Desember 2016 tidak mendapat izin sehingga tidak dapat diselenggarakan (Ji-Hyoung, 2016). Tidak hanya menyerang komponen musik modern Korea Selatan, musisi klasik turut mengalami dampak pasalnya penyanyi soprano Jo Su Mi dihapuskan dari konser tribute untuk Maria Callas di beberapa kota di Tiongkok (The New York Times, 2017). Kelima, pelarangan juga dikenakan untuk produk-produk yang berhubungan dengan konten kebudayaan milik Korea Selatan yakni dengan adanya pelarangan impor terhadap 19 merk K-beauty atau produk kecantikan dan kosmetik dari Korea Selatan, sebagaimana dalam pemasarannya selalu disebar dengan drama, film, musik, dan iklan yang dibintangi oleh artis *hallyu* (Young, 2016).

Keenam, Tiongkok menerapkan sanksi ekonomi melalui adanya larangan terhadap Lotte Grup, salah satu perusahaan Korea Selatan. Beberapa gerai dipaksa tutup dan tidak beroperasi di Tiongkok. Lotte Group menjadi perusahaan Korea selatan paling marak diiklankan lewat bintang-bintang *hallyu* dan persebarannya

mendunia (Min-hee, 2017). Ketujuh, pelarang turut dikenaiak parat sektor pariwisata. Sebagaimana Korea Selatan telah banyak memasarkan industri kebudayaannya, dengan itu berbagai tempat-tempat sejarah dan budaya menjadi salah satu destinasi turis, secara khusus hal ini menarik wisatawan dari Tiongkok. Sebelum diberlakukan sanksi boikot, wisatawan Tiongkok menempati angka tertinggi yang melakukan perjalanan di Korea Selatan, namun pasca THAAD, pemerintah Tiongkok menerapkan hambatan sektor pariwisata-kebudayaan dengan menutup akses perjalanan dan memberikan instruksi untuk tidak lagi menyediakan jasa perjalanan ke Korea Selatan yang berdampak pada penurunan wisatawan Korea Selatan sebanyak 40%. Berikut data penurunan kunjungan turis Tiongkok ke Korea Selatan selama sanksi berlangsung (Harrell, 2018):

Gambar 2.

Data Kunjungan Turis Tiongkok ke Korea Selatan 2017



Sumber: (Peter Harrel (2018) Tiongkok's Use of Coercive Economic Measures, 2018)

Melalui data dalam gambar diatas dapat dilihat adanya penurunan drastis tidak hanya dalam ekspor produk-produk kebudayaan Korea Selatan. Namun turut berdampak pada kemerosotan jumlah kunjungan wisata Tiongkok ke Korea Selatan. Hubungan ekonomi dan perdagangan yang dibangun Tiongkok dan Korea Selatan mengalami kemunduran sejak adanya pemasangan THAAD di Korea Selatan, lebih pagi pasca berbagai penolakan yang diutarakan Tiongkok tidak mampu membuat Korea selatan merubah ketetapan terkait pemasangan THAAD, membuat hubungan keduanya semakin memanas. Untuk itu Tiongkok memberlakukan sanksi ekonomi berupa boikot melalui banyak aspek ekonomi dan perdagangan, namun secara khusus boikot dikenakan terhadap produk-produk yang diproduksi, dikelola, dan dipasarkan oleh industri kebudayaan milik Korea Selatan. Seluruh sanksi boikot yang diberikan Tiongkok membawa kerugian yang besar bahkan berpotensi melemahkan perekonomian Korea Selatan, sebagaimana industri budaya telah menjadi sumber pendapatan utama bagi Korea Selatan. Adapun boikot yang dikenakan Tiongkok membawa ancaman dan tantangan baru yakni berupa kemerosotan perekonomian bagi Korea Selatan ditengah dilema keamanan yang sedang dihadapi Korea Selatan.

2.3 Industri Kebudayaan Korea Selatan

Setiap negara memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, terlebih mendapatkan kekuatan dalam kanca internasional. Berdasarkan strategi atau cara mendapatkannya, Joseph S. Nye kemudian berarguman bahwa kekuatan yang dimiliki negara dikategorikan menjadi dua,

yakni *hard power* dan *soft power*. *Hard Power* merupakan jenis kekuatan yang dimiliki negara melalui strategi atau cara yang keras dan memaksa. Jenis kekuatan ini didapatkan dengan tindakan-tindakan yang sifatnya koersif yakni dengan memberi tekanan dan paksaan kepada pihak yang dianggap lebih lemah. Selain itu, *hard power* diperoleh juga lewat cara-cara yang memancing ataupun melemahkan pihak lain. Sebagai kebalikannya, *soft power* merupakan jenis kekuatan yang dimiliki negara melalui atau cara tanpa menggunakan kekerasan ataupun tanpa paksaan. Kekuatan jenis ini didapatkan dengan menciptakan suatu daya tarik atau situasi dan keadaan yang memungkinkan pihak lain tertarik, bahkan bergantung pada daya tarik tersebut. Lebih lanjut, Joseph S. Nye mengungkapkan bahwa terdapat tiga dasar dari *soft power* yang dimiliki negara, yaitu kebudayaan, nilai politik dan kebijakan luar negeri. Kebudayaan menjadi daya tarik yang ditawarkan negara kepada negara lain, kemudian nilai politik dan kebijakan luar negeri menjadi citra yang dibangun untuk merepresentasikan negara di kanca internasional (Nye, 2008).

Adapun *soft power* yang diupayakan negara melalui kebudayaan dikelompokkan atas dua, yaitu Pertama, *high culture* atau jenis kebudayaan seperti seni tradisional, literatur, dan pendidikan yang mampu menarik perhatian kelompok tertentu. Kedua, *pop culture* atau jenis kebudayaan yang menjadi peleburan diantara kebudayaan tradisional dan kebudayaan yang massif atau dikonsumsi secara massa dan kemudian dikemas dalam berbagai media hiburan. Kekuatan dari mengembangkan kebudayaan dan memproduksinya menjadi suatu karya seni yang diminati secara global ditetapkan oleh Korea Selatan sebagai strategi negara untuk

mendapatkan *power* (Lee, 2011). Korea Selatan menjadi salah satu negara yang memilih strategi mengembangkan kekuatan negara secara *soft power* sebagaimana negara fokus dalam mengembangkan industri kebudayaan sebagai salah satu kapabilitas negara di kanca internasional. Tidak hanya sebagai citra bagi negara, industri kebudayaan menjadi sumber devisa atau pendapatan utama negara. Industri kebudayaan milik Korea Selatan dikenal dengan istilah *Korean wave* atau *Hallyu*. *Hallyu* menjadi kebudayaan populer yang diproduksi dan disebarkan Korea Selatan dan diekspor ke negara-negara lain, sebagaimana motivasi menyebarkan *hallyu* tidak hanya berhenti pada motivasi menyebarkan daya tarik namun juga motivasi ekonomi (Cho, 2005). Dalam *hallyu*, Korea Selatan mampu merepresentasikan berbagai kebudayaan tradisional negara dan dikemas secara modern dalam film, drama, musik, dan produk-produk hiburan lainnya (Chua, 2010).

Sejak tahun 1990-an, Korea Selatan sangat gencar dalam memproduksi dan menyebarkan industri kebudayaan ke banyak negara. Hal ini membawa kebudayaan Korea Selatan menuju popularitas dan mendunia. Fenomena menduniannya kebudayaan Korea Selatan dikenal sebagai gelombang Korea atau *korean wave*. Fenomena ini diawali dengan maraknya kebudayaan Korea Selatan dikonsumsi dan di gemari di banyak negara di kawasan Asia Timur seperti Tiongkok, Taiwan, negara Asia lainnya seperti Indonesia, Thailand, dan berkembang hingga ke Eropa, Amerika, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Istilah *korean wave* atau *hallyu* sendiri dipopulerkan oleh media Tiongkok sebagai respon atas kepopuleran beberapa produk budaya Korea Selatan diantara kalangan muda di Tiongkok. Berdasarkan

data historis persebaran industri kebudayaan Korea Selatan, Tiongkok menjadi negara pertama tujuan ekspor dan menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan tingginya minat dan konsumsi publik Tiongkok atas industri kebudayaan yang dikenal sebagai hallyu (Liu, 2007).

Sejak saat itulah ditandai sebagai awal munculnya hallyu atau lebih dikenal sebagai *korean wave* oleh masyarakat internasional. Kepopuleran Korean Wave dimulai pada saat Tiongkok mulai menayangkan drama Korea, seperti *What is Love* di salah satu stasiun TV Tiongkok yaitu China Central Television Station (CCTV) pada sekitar tahun 1997. Drama pertama Korea yang ditayangkan di luar negara ini mendapatkan respon yang sangat baik, dan diputarkan kembali pada tahun 1998 dan berada ditingkat tertinggi kedua dalam sejarah perfilman di Tiongkok. Tidak berhenti disitu, Tiongkok kemudian ditetapkan sebagai pangsa pasar terbesar industri kebudayaan Korea Selatan selama tahun 2014 dan 2015 (Kim, 2007). Adapun produk kebudayaan yang pertama kali dikenalkan oleh Korea Selatan kepada Tiongkok adalah berupa drama yang kemudian dikenal secara global sebagai K-drama. Dengan semakin berkembangnya peminat K-drama di Tiongkok, Korea Selatan memperluas pengaruh dengan mengekspor K-drama dan produk kebudayaan lain berupa musik ke lebih banyak negara Asia, seperti Taiwan, Jepang, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Produk kebudayaan berupa musik ini digemari dan dikonsumsi oleh massa yang kemudian secara global dikenal sebagai K-pop (Parc, 2013).

Indonesia juga merupakan salah satu negara tempat perkembangan *korean wave* yang terbilang pesat dimana dalam kurun waktu tahun 2006 hingga tahun

2019 konsumsi akan produk hallyu tinggi dan disertai juga dengan terbentuknya citra ataupun pandangan positif masyarakat Indonesia terhadap Korea Selatan. Meningkatnya *image* Korea Selatan melalui korean wave yang diimplementasikan sebagai salah satu bentuk instrumen pelaksanaan *soft power* juga memiliki pengaruh positif di bidang ekonomi. Peningkatan yang signifikan dalam hubungan Indonesia dan Korea Selatan juga tercermin dengan baik melalui perkembangan pesat perdagangan bilateral antara kedua negara. Menurut data dari *Korea Tourism Organization* di Jakarta, pada tahun 2016 pertumbuhan pasar Indonesia ke Korea naik signifikan dengan kunjungan sekitar 300 ribu wisatawan. Angka ini naik 53.2% dibandingkan kunjungan di tahun 2015 yang sebesar 198 ribu dan pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebanyak 12%. Namun di Indonesia pariwisata menjadi produk kebudayaan paling berdampak dalam tahun 2015 hingga 2016, sementara produk kebudayaan lainnya marak ditemui di tahun berikutnya. Dengan itu, persebaran produk-produk di berbagai negara Asia dinilai belum mampu menyainyi ataupun sebanding dengan persebaran di Tiongkok sebagaimana Tiongkok tetap menjadi negara pengimpor terbesar (Johnson, 2017).

Kepopuleran budaya Korea di Tiongkok tidak hanya tampak melalui tingginya ekspor Korea Selatan ke Tiongkok, namun juga dapat dilihat melalui tingginya antusias dan minat publik Tiongkok terhadap produk-produk kebudayaan milik Korea Selatan. Selain 'What is Love?', drama Korea yang turut menuai minat dan mendapat rating paling tinggi melalui penayangannya di televisi nasional Tiongkok adalah "Winter Sonata". Drama ini diproduksi pada tahun 2003 di Tiongkok dan ditayangkan pada tahun 2005 di televisi nasional Tiongkok dan

berhasil menuai fenomena fanatisme dari penikmat drama di Tiongkok, yang mana tokoh utama dalam drama berhasil mendapatkan dukungan dari banyak penggemar di Tiongkok hingga kemudian membintangi berbagai iklan produk Tiongkok. Tidak berhenti disitu, kepopuleran juga tampak dengan tingginya antusias wisatawan dari Tiongkok yang masuk ke Korea Selatan demi dapat mengunjungi berbagai lokasi dalam drama seperti di Chuncheon, Namiseom Island, dan Yongpyeong Ski Resort yang kemudian menjadi destinasi wisata populer Korea Selatan yang dikunjungi turis dari Tiongkok (Parc, 2013). Selain itu terdapat drama lainnya yang mampu menciptakan fenomena dan trend baru secara khusus bagi publik di Tiongkok. Drama “Dae Jang Geum” merupakan sebuah drama kolosal yang mengisahkan kisah sejarah kerajaan Korea pada abad ke-16. Drama ini berhasil membawa trend yang dikenal sebagai *global healthy living* yakni dengan mengenalkan pengobatan dan makanan tradisional Korea melalui drama hingga hingga kemudian banyak dikonsumsi di Tiongkok dan banyak negara lainnya (Cho, 2005).

Produk kebudayaan lainya yang mendunia adalah musik asal Korea Selatan atau K-pop yang dikenal dengan grup-grup musik, seperti grup-grup musik seperti S.E.S, H.O.T., NRG, Baby V.O.X, EXO, dan BTS yang menuai minat tinggi dari penggemar secara global, secara khusus di Tiongkok (Liu, 2007). Sejak masuk ke Tiongkok pada tahun 2000, K-pop menuai popularitas yang dapat dilihat melalui jumlah kopi lagu yang terjual serta ketenaran musik Korea tersebut di tangga lagu Tiongkok. Hal ini dialami salah satu grup musik yakni H.O.T. yang berhasil menjual 100.000 kopi lagu di Tiongkok pada tahun 2001. Tidak hanya lewat penjualan lagu, popularitas K-pop di Tiongkok turut meningkatkan pariwisata Korea Selatan

sebagaimana negara ini kemudian menjadi destinasi wisata karna adanya penyelenggaraan berbagai konser musik K-pop (Kim, 2007).

Adapun popularitas dan kesuksesan yang tengah dirasakan Korea Selatan melalui persebaran hallyu secara mendunia atau secara khusus kesuksesan hallyu di Tiongkok yang menjadi pusat persebaran hallyu nomor satu tentu disebabkan oleh banyak aspek, seperti kemampuan Korea Selatan mengemas kebudayaan menjadi produk yang mudah diterima oleh berbagai kalangan dan bernuasa kekinian, adanya keindahan yang kerap disajikan dalam setiap penampilan, mulai dari pemandangan, pakaian, model rambut yang dikonsept kekinian. Lebih lagi, kebudayaan Korea Selatan menjadi kebudayaan yang menarik dengan berbagai karya yang diproduksi secara modern tanpa melepas originalitas nilai-nilai tradisional budaya Korea Selatan (William, 2018). Selain itu, kesuksesan *hallyu* juga tidak terlepas dari peran yang kuat dari pemerintah Korea Selatan. Meskipun industri kebudayaan tidak berada dibawah naungan pemerintahan Korea Selatan melainkan milik perusahaan-perusahaan swasta, namun pemerintah tidak serta merta lepas tangan namun turut dalam mendukung produksi dan penyebaran *hallyu* (Liu, 2007). Peranan pemerintah dalam mendorong popularitas *hallyu* juga tampak dalam pernyataan Kim Jengdeok, Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Turisme Korea Selatan (Republic of Korea, 2016):

“We, the Korean government and the culture ministry, support the work they want to make, but we would not take any role or whatsoever as a decision maker or in getting involved in the actual working process at all. It’s the working people, I mean, film makers or singers, who take the lead in actually promoting the Korean Wave outside South Korea”- Kim Jongdeok

Melalui argumen diatas dapat dipahami bagaimana pemerintah Korea Selatan telah menaruh kepercayaan penuh dan memberi kebebasan bagi para pelaku seni untuk berkarya di negara dan di kanca internasional. Tidak hanya bebas dalam berkarya, pemerintah juga memeberi kebebasan bagi para pekerja seni untuk mempromosikan *hallyu* ke mancanegara, hal ini terlihat sebagai satu alasan popularitas *hallyu*. Sebagaimana dalam penyebaran dan promosi *hallyu* para pekerja seni dibebaskan dalam melakukan berbagai inovasi memasarkan *hallyu*. Meskipun Korea Selatan memiliki bidang kementrian kebudayaan yang fokus dalam isu ini namun pemerintah mampu tidak mengambil peranan dominan dalam mengembangkan kebudayaan negara.

Nasionalisme yang tinggi menjadi aspek lain yang membawa *hallyu* menuju polularitas di kanca Internasional. Para pelaku industri perfilman, musik, kosmetik, makanan, fashion dan lain-lain selalu berusaha memasukkan kebudayaan asli Korea Selatan ke dalam setiap karya yang diproduksi dan dikemas ke dalam berbagai jenis karya yang dapat dinikmati secara mendunia. Para pelaku industri kebudayaan percaya bahwa peran mengenalkan dan mengembangkan kebudayaan negara tidak hanya berada di pundak pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab masyarakat Korea Selatan (Shon, 2016). Dengan semakin gigihnya para pelaku industri dalam berkarya, pemerintah Korea Selatan turut semakin berkomitmen dalam mendukung dan melestarikan setiap kegiatan yang bersentuhan dengan budaya populer *hallyu*.

Keseriusan pemerintah diutarakan oleh Kementrian Luar Negeri dalam *White Paper* Korea Selatan yang dilansir pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pemerintah Korea Selatan menyadari industri kebudayaan telah menjadi sesuatu

yang esensial dalam mencapai kepentingan negaranya. Tidak hanya menjadi salah satu potensi negara yang menjadi sumber utama devisa sekaligus pendapatan negara, pemerintah menyadari adanya potensi selain ekonomi yang berhasil dibawa oleh popularitas *hallyu*. Melalui *hallyu*, Korea Selatan menjadi negara yang dikenal dan dipandang oleh banyak negara, lebih lagi digemari dan diminati oleh penggemar yang tersebar di seluruh penjuru dunia. *Hallyu* sebagai *soft power* telah membawa kekuatan baru bagi negara dimana tidak hanya sekedar mengeskpor berbagai produk kebudayaan ke banyak negara, popularitas ini menarik banyak peminat dan massa untuk berkunjung dan melihat Korea Selatan secara lebih dekat, hal ini kemudian yang menjelaskan keterkaitan popularitas *hallyu* dengan eskalasi pariwisata negara. *Hallyu* bukan lagi sekedar transfer budaya lintas-negara atau perluasan industri hiburan, namun telah menjadi kekuatan bagi Korea Selatan dalam meningkatkan pendapatan negara hingga citra dan eksistensi negara di kancqa internasional (Lee, 2011).